



## Evaluasi fasilitas dan aksesibilitas pada gedung kantor BPJS kesehatan Sleman

Adena Putri Br Surbakti<sup>a\*</sup>, Hermin Werdiningsih<sup>a</sup>

<sup>a\*</sup>, <sup>a</sup> *Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, Indonesia*

### ARTICLE INFO

#### Corresponding author:

Email:

[adena.p.sbt@gmail.com](mailto:adena.p.sbt@gmail.com)

#### Article history:

Received : 08 June 2024

Accepted : 25 June 2024

Publish : 30 December 2024

#### Keywords:

*accessibility, assessment, BPJS health, facilities, office*

### ABSTRACT

*User diversity in a public building brings up the diversity of user needs. In providing user needs, universal design is the correct answer. However, the importance of universal design's application to create an environment without physical boundaries, age, or gender has not yet been widely realized. Therefore, the need for activities in a building is often not fulfilled, especially for people with disabilities. This also occurs in most office buildings in Indonesia, where the facilities and accessibility provided by offices do not yet meet universal design standards. Facilities and accessibility are among the things that should be considered to ensure that activities carried out within buildings are not hindered. This research aims to evaluate the facilities and accessibility in the BPJS Health Office building in the Sleman branch to determine its compliance with universal design standards. The method applied in this research is a quantitative descriptive approach and evaluative analysis. The data analyzed consists of site data and building data related to the design object in the form of Detailed Engineering Design (DED) drawings. The results of this research indicate that several facilities are already available in the BPJS Sleman Office building, including doors, corridors, ramps, stairs, toilets, and parking areas. However, the facilities and accessibility in the building are not fully compliant with the standards outlined in Ministerial Regulation PUPR No. 14 of 2017 concerning Building Accessibility Requirements. Therefore, recommendations are needed regarding adjustments to the facility and accessibility needs in the BPJS Sleman Office building based on the standards outlined in Ministerial Regulation PUPR No. 14 of 2017.*

Copyright © 2024 PILARS-UNDIP

## 1. Pendahuluan

Dilansir dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, data menunjukkan sekitar 8% atau 22,5 juta orang di Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Sesuai dengan UU. No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas, definisi disabilitas merujuk kepada setiap orang dengan keterbatasan fisik, intelektual, sensorik, dan/atau mental. Kelompok yang termasuk di dalamnya diantaranya lain, bayi dan anak-anak, orang tua, ibu hamil, pengguna kursi roda, orang yang bergerak dengan bantuan alat, serta orang dengan gangguan penglihatan dan pendengaran.

Fasilitas publik merupakan sarana yang disediakan untuk kepentingan umum yang digunakan oleh beragam pengguna dengan beragam kebutuhan. Dengan demikian, dibutuhkan penerapan desain universal pada fasilitas publik. Desain universal, menurut Ronal L. Mace, ialah sebagai suatu konsep yang penerapannya pada perancangan berbagai hal (seperti produk/barang, lingkungan, bangunan, fasilitas dan ruang publik, program komputer dan layanan) bertujuan agar semua kelompok pengguna dapat menggunakannya dengan efisiensi yang maksimal, tanpa perlu dilakukannya proses adaptasi atau penyediaan desain khusus. Dalam belasan tahun terakhir, muncul definisi baru mengenai desain

universal oleh Steinfeld dan Maisel. Desain universal merupakan proses yang memberi kemungkinan dan pemberdayaan untuk keberagaman populasi yang meningkatkan kinerja manusia, kesejahteraan dan kesehatan, dan partisipasi sosial. Namun berdasarkan beberapa sumber, upaya dalam penerapan universal desain pada fasilitas umum, termasuk bangunan publik, masih banyak yang belum memenuhi standar aksesibilitas. Kementerian PUPR sendiri terus berupaya dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua orang serta memiliki fasilitas yang ramah terhadap anak-anak, perempuan, orang tua dan difabel. Hal ini dijelaskan dalam prdoman yang menjadi Standar Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006.

Saat ini, kebutuhan akan aksesibilitas dan fasilitas bagi difabel pada bangunan perkantoran di Indonesia yang masih belum terpenuhi, bahkan terabaikan. Sebagai bangunan publik, kantor seharusnya memperhatikan standar kemudahan bangunan gedung dalam mengupayakan kemudahan akses bagi seluruh pengguna bangunan. Kantor dalam KBBI, pengertian dari kantor ialah suatu tempat, baik berupa gedung, rumah, atau ruangan, di mana pekerjaan atau aktivitas kerja dilakukan, dan juga dikenal sebagai tempat kerja. Moekijat (2008) menjelaskan bahwa kantor adalah setiap tempat yang biayanya digunakan untuk menjalankan pekerjaan administratif, terlepas dari nama yang diberikan pada tempat tersebut.

Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sleman merupakan bangunan publik berupa kantor pelayanan umum dengan pengguna bangunan dari berbagai kalangan usia dan gender. Gedung kantor BPJS Kesehatan Sleman akan dikaji berdasarkan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 terhadap fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan tersebut. Adapun fasilitas didefinisikan sebagai hal yang dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam pencapaian suatu tujuan tertentu oleh Zakiah Daradjat. Sementara menurut Suryo Subroto, fasilitas merujuk pada apapun yang mampu memperlancar dan mempermudah pelaksanaan suatu usaha, baik berupa barang maupun uang. Berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8, aksesibilitas mengacu pada penyediaan kemudahan kepada penyandang difabel agar mereka dapat mencapai kesetaraan dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan. Adapun standar teknis untuk bangunan yang aksesibel dan fasilitasnya tertera dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung disajikan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

**Tabel 1.** Standar teknis hubungan horizontal

No.	Sub Variable	Rincian Teknis
<b>Pintu</b>		
1	Bukaan	Lebar efektif untuk pintu utama $\geq 90$ cm, pintu lainnya $\geq 80$ cm.
2	Ruang bebas	Ruang bebas berukuran $\geq 170$ cm x $170$ cm untuk pintu ayun dengan arah buka keluar pada luar ruangan, dan $\geq 152,5$ cm x $152,5$ cm pada dalam ruangan
3	Handle	Jarak tinggi maksimal antara <i>handle</i> dan permukaan lantai sebesar $110$ cm Tidak licin, dan bukan tuas putar Tipe tuas, tarik dan dorong, memiliki ujung dengan bentuk yang melengkung ke dalam
4	Pengaman	Pintu kaca diberikan tanda yang kontras dan mudah terlihat
<b>Koridor</b>		
1	Lebar efektif	Minimal ukuran $92$ cm, disarankan $152$ cm
2	Penanda	Petunjuk arah yang jelas dan informatif
3	Material penutup lantai	Tidak licin

**Tabel 2.** Standar teknis hubungan vertikal

No.	Sub Variable	Rincian Teknis
<b>Tangga</b>		
1	Dimensi	Tinggi pijakan $15-17$ cm Lebar pijakan minimal $28-30$ cm. Lebar minimal tangga $120$ cm. Pijakan memiliki ukuran yang seragam. Maksimal $12$ anak tangga sebelum bordes.

No.	Sub Variable	Rincian Teknis
2	Tekstur lantai	Tidak berlubang
3	Derajat kemiringan	Maksimum 35°
4	<i>Handrail</i>	Minimal ada pada salah satu sisi tangga. Rentang tinggi 65-80 cm. Bagian ujung <i>handrail</i> bulat atau dibelokkan ke arah lantai, dinding atau tiang. Dilengkapi dengan huruf Braille
5	Blauster	Dilengkapi pada sisi tangga yang tidak terdapat dinding. Kisi - kisi rapat
6	Nosing	Lebar maksimal 4 cm
<b>Ramp</b>		
1	Derajat kemiringan	Pada interior maksimal 6° atau 1:10. Pada eksterior maksimal 5° atau dengan perbandingan 1:12 antara tinggi dan kemiringan.
2	Dimensi	Lebar minimal 95cm (tanpa kanstin) dan 120 (dengan kanstin)
3	Panjang jalur	Maksimum 900 cm
4	Tepi pengaman	Tinggi minimal tepi pengaman 10 cm.
5	Lantai	Bertekstur dan tidak licin
6	<i>Handrail</i>	Terdapat ( <i>handrail</i> pada kedua sisi ram. Penambahan <i>handrail</i> di tengah untuk ram dengan lebar > 220 cm.) Jarak antara dinding <i>handrail</i> minimal 5 cm Ketinggisan <i>handrail</i> 80 cm dari permukaan lantai
<b>Lift</b>		
Pada bangunan gedung yang memiliki ketinggian > 1 lantai, disediakan lift dengan penyesuaian kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.		

Tabel 3. Standar teknis sarana dan prasarana

No.	Sub Variable	Rincian Teknis
<b>Toilet</b>		
1	Dimensi	Ukuran ruang $\geq 80 \times 155$ cm untuk toilet umum Ukuran ruang $\geq 152,5 \times 227,5$ cm untuk toilet difabel
2	Pintu	Lebar $\geq 70$ cm untuk toilet umum Lebar $\geq 90$ cm untuk toilet difabel, membuka ke arah luar
3	Persentase luasan	2% dari luas lantai bangunan gedung
4	Wastafel	Ukuran minimal 45 x 60 cm Ketinggian wastafel 85 cm, 75 cm untuk difabel Ruang bebas minimal 60 cm
5	Urinal	Ketinggian kloset 45 cm untuk pengguna kursi roda
<b>Tempat Parkir</b>		
1	Persentase luasan	20%-30% dari luas lantai bangunan gedung
2	Dimensi area	Ukuran 370 x 500 cm untuk parkir Tunggal dan 620 x 500 cm untuk parkir ganda (parkir mobil difabel) Ukuran 230 x 500 cm untuk parkir mobil pengguna lainnya Parkir sepeda motor 70 x 200 cm
3	Jarak pencapaian	Maksimal 60 m dari pintu masuk bangunan
4	Penanda	Simbol penanda parkir penyandang difabel berwarna kontras, dan memiliki penahan ban
<b>Rambu dan Marka</b>		
Informatif dan mudah terlihat Ukuran disesuaikan dengan jarak baca Jenis material tahan cuaca Warna yang kontras		

## 2. Data dan metode

### 2.1. Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPJS Sleman berlokasi di Jl. Magelang No.KM.14, Jetis, Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan ini merupakan gedung 3 lantai dengan luas lahan 2.316 m<sup>2</sup> yang ditunjukkan pada Gambar 1. Adapun batasan lahan bangunan ialah sebagai berikut:

Sebelah timur : Alifs Bakery, rumah warga  
 Sebelah barat : Indomaret Murangan, Ganesha Operation, dan rumah warga  
 Sebelah utara : Rumah warga  
 Sebelah Selatan : Jalan raya



**Gambar 1.** Lokasi kantor BPJS Sleman

## 2.2. Metode penelitian

Penelitian ini akan mengevaluasi kesesuaian fasilitas dan aksesibilitas gedung kantor BPJS kesehatan Sleman terhadap standar yang ada dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kuantitatif dan analisis evaluatif. Perolehan data kuantitatif dilakukan dengan studi pustaka, pemahaman gambar kerja, dan studi analisis. Adapun metode analisis evaluatif yang akan dilakukan yaitu dengan pengumpulan data melalui buku pedoman universal desain, artikel dan jurnal, penelitian terdahulu, serta standar yang tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan kemudahan Bangunan Gedung. Data yang akan dievaluasi berdasarkan standar tersebut diperoleh dari gambar kerja (DED) bangunan. Dengan menganalisis data-data tersebut, maka akan dilakukan evaluasi terhadap bangunan kantor BPJS Sleman dengan mengidentifikasi fasilitas dan aksesibilitas serta kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.

## 2.3. Metode pengumpulan data

Data bangunan gedung yang akan dievaluasi berupa gambar kerja (DED) bangunan dan dokumentasi objek penelitian diperoleh dari pihak konsultan PT. Aretas Wicaksana yang ditunjukkan pada Gambar 2 sedangkan dokumentasi kondisi eksisting disajikan pada Gambar 3.



**Gambar 2.** Gambar kerja kantor BPJS Sleman



**Gambar 3.** Dokumentasi kantor BPJS Sleman

### 3. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan analisis yang mengacu pada standar Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2017 terhadap gedung kantor BPJS Kesehatan cabang Sleman, memperoleh data hasil yang masing-masing disajikan pada Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6.

**Tabel 4.** Standar teknis hubungan horizontal

No	Sub Variable	Rincian Teknis	Hasil Analisis	
<b>Pintu</b>			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Bukaan	Lebar efektif untuk pintu utama $\geq 90$ cm, pintu lainnya $\geq 80$ cm.	PJ1, PJ2, PJ3, P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P8', P9	
2	Ruang bebas	Ruang bebas berukuran $\geq 170$ cm x 170 cm untuk pintu ayun dengan arah buka keluar pada luar ruangan, dan $\geq 152,5$ cm x 152,5 cm pada dalam ruangan	PJ1, PJ3, P2, P8', P9	P5, P6
3	Handle	Jarak tinggi maksimal antara <i>handle</i> dan permukaan lantai sebesar 110 cm	PJ1, PJ2, PJ3, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P8', P9	
		Tidak licin, dan bukan tuas putar	PJ1, PJ2, PJ3, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P8', P9	
		Tipe tuas, tarik dan dorong, memiliki ujung dengan bentuk yang melengkung ke dalam	PJ1, PJ2, PJ3, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P8', P9	
4	Pengaman	Pintu kaca diberikan tanda yang kontras dan mudah terlihat		PJ1, PJ2
<b>Koridor</b>				
1	Lebar efektif	Minimal ukuran 92 cm, disarankan 152 cm	K1, K2	
2	Penanda	Petunjuk arah yang jelas dan informatif		K1, K2
3	Material penutup lantai	Tidak licin	K1, K2	

**Tabel 5.** Standar teknis hubungan vertikal

No	Sub Variable	Rincian Teknis	Hasil Analisis	
<b>Tangga</b>			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Dimensi	Tinggi pijakan 15-17 cm Lebar pijakan minimal 28-30 cm. Lebar minimal tangga 120 cm. Pijakan memiliki ukuran yang seragam. Maksimal 12 anak tangga sebelum bordes.	T1, T2 T1, T2 T1, T2 T1, T2	

No	Sub Variable	Rincian Teknis	Hasil Analisis	
			T1, T2	
2	Tekstur lantai	Tidak berlubang	T1, T2	
3	Derajat kemiringan	Maksimum 35°	T1, T2	
4	Handrail	Minimal ada pada salah satu sisi tangga. Rentang tinggi 65-80 cm. Bagian ujung <i>handrail</i> bulat atau dibelokkan ke arah lantai, dinding atau tiang. Dilengkapi dengan huruf Braille	T1, T2	T1, T2 T1, T2
5	Blauster	Dilengkapi pada sisi tangga yang tidak terdapat dinding. Kisi - kisi rapat	T1, T2	T1, T2
6	Nosing	Lebar maksimal 4 cm	T1, T2	
<b>Ramp</b>				
1	Derajat kemiringan	Pada interior maksimal 6° atau 1:10. Pada eksterior maksimal 5° atau dengan perbandingan 1:12 antara tinggi dan kemiringan.	- R1	
2	Dimensi	Lebar minimal 95cm (tanpa kanstin) dan 120 (dengan kanstin)	R1	
3	Panjang jalur	Maksimum 900 cm	R1	
4	Tepi pengaman	Tinggi minimal tepi pengaman 10 cm.		R1
5	Lantai	Bertekstur dan tidak licin	R1	
6	Handrail	Terdapat ( <i>handrail</i> pada kedua sisi ram. Penambahan <i>handrail</i> di tengah untuk ram dengan lebar > 220 cm.) Jarak antara dinding <i>handrail</i> minimal 5 cm Ketinggisan <i>handrail</i> 80 cm dari permukaan lantai		R1 R1
<b>Lift</b>				
		Pada bangunan gedung yang memiliki ketinggian > 1 lantai, disediakan lift dengan penyesuaian kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.		Tidak Sesuai

**Tabel 6.** Standar teknis sarana dan prasarana

No	Sub Variable	Rincian Teknis	Hasil Analisis	
<b>Toilet</b>			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Dimensi	Ukuran ruang ≥ 80 x 155 cm untuk toilet umum Ukuran ruang ≥ 152,5 x 227,5 cm untuk toilet difabel	KM1, KM4 KM3	KM2, KM5
2	Pintu	Lebar ≥ 70 cm untuk toilet umum Lebar ≥ 90 cm untuk toilet difabel, membuka ke arah luar	KM1, KM4, KM3	KM2, KM5
3	Persentase luasan	2% dari luas lantai bangunan gedung	✓	
4	Wastafel	Ukuran minimal 45 x 60 cm Ketinggian wastafel 85 cm, 75 cm untuk difabel Ruang bebas minimal 60 cm	✓ ✓ ✓	
5	Urinal	Ketinggian kloset 45 cm untuk pengguna kursi roda	✓	
<b>Tempat Parkir</b>				
1	Persentase luasan	20%-30% dari luas lantai bangunan gedung	✓	
2	Dimensi area	Ukuran 370 x 500 cm untuk parkir Tunggal dan 620 x 500 cm untuk parkir ganda (parkir mobil difabel) Ukuran 230 x 500 cm untuk parkir mobil pengguna lainnya Parkir sepeda motor 70 x 200 cm	✓ ✓	✓

No	Sub Variable	Rincian Teknis	Hasil Analisis
3	Jarak pencapaian	Maksimal 60 m dari pintu masuk bangunan	✓
4	Penanda	Simbol penanda parkir penyandang difabel berwarna kontras, dan memiliki penahan ban	✓
<b>Rambu dan Marka</b>			
	Informatif dan mudah terlihat		✓
	Ukuran disesuaikan dengan jarak baca		✓
	Jenis material tahan cuaca		✓
	Warna yang kontras		✓

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan acuan standar desain universal, kantor BPJS Kesehatan Sleman sudah menyediakan beberapa fasilitas untuk difabel, ialah koridor; ramp; dan toilet. Namun, berdasarkan hasil evaluasi dari penulis, penerapan universal desain berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 pada gedung kantor BPJS Kesehatan Sleman masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar.

- 1) Pada hubungan horizontal, sebagian besar standar telah terpenuhi. Adapaun standar yang belum terpenuhi ialah, ruang bebas dan pengaman untuk pintu, serta penanda untuk koridor.
- 2) Standar universal desain untuk aksesibilitas hubungan vertikal yang belum terpenuhi yaitu, handrail pada tangga dan tepi pengaman pada ramp.
- 3) Untuk sarana dan prasarana gedung kantor ini, standar untuk toilet telah terpenuhi, tempat parkir belum terpenuhi karena belum menyediakan parkir untuk difabel. Lalu untuk rambu dan marka tidak ditemukan pada data (gambar kerja) bangunan yang dievaluasi.

#### Referensi

- Anindya, L.A. (2020). KAJIAN AKSESIBILITAS TANGGA BERDASARKAN KONSEP UNIVERSAL DESAIN & PREFERENSI PENGGUNA. *IMAJI*, 9(5),611-620.
- BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sleman. Sumber: [https://idalamat.com/alamat/3372/bpjs-kesehatan-kantor-cabang-sleman#google\\_vignette](https://idalamat.com/alamat/3372/bpjs-kesehatan-kantor-cabang-sleman#google_vignette)
- Dolph, E. (2021). THE DEVELOPING DEFINITION OF UNIVERSAL DESIGN.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Standar Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 1-59. Jakarta, Indonesia: Seminar Kesehatan Pengembangan Sinergitas Layanan Kesehatan Inklusi yang Tangguh dan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas..
- Keumala, C. R. N. (2016). PENGARUH KONSEP DESAIN UNIVERSAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN DIFABEL: Studi Kasus Masjid UIN Sunan Kalijaga dan Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, *INKLUSI: Journal of Disabillities*, 3(1),19-39. doi: <https://doi.org/10.14421/ijds.030102>
- Kominfo Perkuat Kolaborasi Aksi Literasi Digital untuk Disabilitas. (22 Oktober 2023). Sumber: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/47936/siaran-pers-no-35hmkominfo032023-tentang-kominfo-perkuat-kolaborasi-aksi-literasi-digital-untuk-disabilitas/0/siaran\\_pers#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,yang%20sebesar%2016%2C5%20juta.](https://www.kominfo.go.id/content/detail/47936/siaran-pers-no-35hmkominfo032023-tentang-kominfo-perkuat-kolaborasi-aksi-literasi-digital-untuk-disabilitas/0/siaran_pers#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,yang%20sebesar%2016%2C5%20juta.)
- Kusumaningrum, D. N., Sungkar O.A., Agustin, R.A., Herwiandini, M. (2017). Pengaruh ASEAN Disability Forum Terhadap Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *ResearchGate*, 4(01), 13. doi:10.20884/1.ins.2017.4.01.480
- Melampaui Aksesibilitas Ke Desain Universal, Komite Aksesibel WBDG, Jordana L. Maisel, PhD dan Molly Rahanan, Phd. (23 Mei 2024) Sumber: <https://www.wbdg.org/design-objectives/accessible/beyond-accessibility-universal-design>,
- Pedoman Standar Desain Bangunan Gedung BPJS Kesehatan. (23 Mei 2024). Sumber: Scribd
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. (2006). Nomor : 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Jakarta.
- Undang-Undang. (2016). Nomor: 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.